



SALINAN

LURAH TRIMULYO
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO NOMOR 10 TAHUN
2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMULYO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);

23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Urutan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah

- Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);
 36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
 37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
 38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 05);
 39. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

40. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
41. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);
42. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
43. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 20);
44. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Dukungan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Bantul untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 55);
45. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberhentian Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 75);
46. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
47. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
48. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

49. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Berisifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 133);
50. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 134);
51. Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2021 tentang Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan Serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 179);
52. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9);
53. Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 29);
54. Peraturan Desa Trimulyo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Trimulyo Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Trimulyo Tahun 2017 Nomor 4);
55. Peraturan Desa Trimulyo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Trimulyo Tahun 2020 Nomor 2);
56. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 11);

57. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12);
58. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 3);
59. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Trimulyo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 7);
60. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 8);
61. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 9);
62. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimulyo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMULYO
dan
LURAH TRIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TRIMULYO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 6.201.357.418,00 (Enam Milyar Dua Ratus Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah) berkurang Rp. 126.853.664,00 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.074.503.754,00 (Enam Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

a. Semula	Rp 5.271.335.539,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (41.978.439,00)</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 5.229.357.100,00

2. Belanja Kalurahan

a. Semula	Rp 6.201.357.418,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (126.853.664,00)</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 6.074.503.754,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (845.146.654,00)

3. Pembiayaan Kalurahan

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 930.021.879,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (84.875.225,00)</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 845.146.654,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah/(Berkurang) (a – b)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 845.146.654,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Trimulyo.

Ditetapkan di Trimulyo
pada tanggal 12 Agustus 2022
LURAH TRIMULYO,

Ttd.

JAUZAN SANUSI

Diundangkan di Trimulyo
pada tanggal 12 Agustus 2022
CARIK TRIMULYO,

Ttd.

ARIF MUHAMMAD FAUZI

LEMBARAN KALURAHAN TRIMULYO TAHUN 2022 NOMOR 4
NO.REG PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL (04/TRIMULYO/2022)



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TRIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Kalurahan	700.906.000,00	700.906.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.519.181.539,00	4.477.203.100,00	(41.978.439,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	51.248.000,00	51.248.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.271.335.539,00	5.229.357.100,00	(41.978.439,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	1.647.498.920,00	1.643.420.920,00	(4.078.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.278.127.063,00	3.161.263.169,00	(116.863.894,00)	
5.3.	Belanja Modal	624.500.050,00	618.993.000,00	(5.507.050,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	651.231.385,00	650.826.665,00	(404.720,00)	
	JUMLAH BELANJA	6.201.357.418,00	6.074.503.754,00	(126.853.664,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(930.021.879,00)	(845.146.654,00)	84.875.225,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	930.021.879,00	845.146.654,00	(84.875.225,00)	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	930.021.879,00	845.146.654,00	(84.875.225,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	930.021.879,00	845.146.654,00	(84.875.225,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

TRIMULYO, 12 Agustus 2022

LURAH TRIMULYO

Drs. H. JAUZAN SANUSI, MA.

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TRIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Kalurahan	700.906.000,00	700.906.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Kalurahan	690.906.000,00	690.906.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.519.181.539,00	4.477.203.100,00	(41.978.439,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	1.574.469.000,00	1.574.469.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	318.090.484,00	290.933.300,00	(27.157.184,00)	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.403.595.055,00	1.358.478.000,00	(45.117.055,00)	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	238.000.000,00	238.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	985.027.000,00	1.015.322.800,00	30.295.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	51.248.000,00	51.248.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	31.248.000,00	31.248.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.271.335.539,00	5.229.357.100,00	(41.978.439,00)	
	2.	BELANJA				
<u>1.</u>		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN</u>	<u>3.218.255.744,00</u>	<u>3.103.883.597,00</u>	<u>(114.372.147,00)</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan (Maksimal 30% untuk	<u>2.172.592.244,00</u>	<u>2.172.389.047,00</u>	<u>(203.197,00)</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	63.600.000,00	65.100.000,00	1.500.000,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.600.000,00	65.100.000,00	1.500.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	916.488.000,00	916.488.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	916.488.000,00	916.488.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	17.236.320,00	17.236.320,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.236.320,00	17.236.320,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan PI	355.462.324,00	360.586.127,00	5.123.803,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	355.462.324,00	360.586.127,00	5.123.803,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan	150.220.000,00	145.100.000,00	(5.120.000,00)	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	150.220.000,00	145.100.000,00	(5.120.000,00)	
1.1.06		Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (rapat, ATK, M	23.975.000,00	24.154.000,00	179.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.885.000,00	24.154.000,00	269.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	90.000,00	0,00	(90.000,00)	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	145.656.000,00	144.228.000,00	(1.428.000,00)	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.656.000,00	144.228.000,00	(1.428.000,00)	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bam	93.258.000,00	92.943.000,00	(315.000,00)	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	93.258.000,00	92.943.000,00	(315.000,00)	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Ba	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh	382.696.600,00	382.553.600,00	(143.000,00)	
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	382.696.600,00	382.553.600,00	(143.000,00)	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan	266.375.000,00	246.113.000,00	(20.262.000,00)	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	80.410.000,00	62.068.000,00	(18.342.000,00)	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	80.410.000,00	62.068.000,00	(18.342.000,00)	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.925.000,00	6.925.000,00	(2.000.000,00)	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.925.000,00	6.925.000,00	(2.000.000,00)	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (D	177.040.000,00	177.120.000,00	80.000,00	
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	174.580.000,00	174.660.000,00	80.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	119.495.000,00	115.448.000,00	(4.047.000,00)	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	78.790.000,00	74.743.000,00	(4.047.000,00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.834.950,00	11.743.000,00	(4.091.950,00)	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	62.955.050,00	63.000.000,00	44.950,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	
1.3.94		Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	5.005.000,00	5.005.000,00	0,00	
1.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.005.000,00	5.005.000,00	0,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	526.389.500,00	490.973.550,00	(35.415.950,00)	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	50.290.000,00	34.090.000,00	(16.200.000,00)	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.290.000,00	34.090.000,00	(16.200.000,00)	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	68.965.000,00	67.524.500,00	(1.440.500,00)	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.965.000,00	67.524.500,00	(1.440.500,00)	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	29.880.000,00	18.155.000,00	(11.725.000,00)	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.880.000,00	18.155.000,00	(11.725.000,00)	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	11.535.000,00	9.888.000,00	(1.647.000,00)	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.535.000,00	9.888.000,00	(1.647.000,00)	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.700.000,00	1.950.000,00	(750.000,00)	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	1.950.000,00	(750.000,00)	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Kuang	29.815.000,00	26.570.000,00	(3.245.000,00)	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.815.000,00	26.570.000,00	(3.245.000,00)	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	5.527.500,00	4.513.250,00	(1.014.250,00)	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.527.500,00	4.513.250,00	(1.014.250,00)	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.650.000,00	4.350.000,00	(8.300.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.650.000,00	4.350.000,00	(8.300.000,00)	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan	315.027.000,00	323.932.800,00	8.905.800,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	315.027.000,00	323.932.800,00	8.905.800,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	133.404.000,00	78.960.000,00	(54.444.000,00)	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	57.124.000,00	18.080.000,00	(39.044.000,00)	
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.124.000,00	18.080.000,00	(39.044.000,00)	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	76.280.000,00	60.880.000,00	(15.400.000,00)	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.280.000,00	60.880.000,00	(15.400.000,00)	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	1.569.273.000,00	1.563.683.000,00	(5.590.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	90.305.000,00	87.805.000,00	(2.500.000,00)	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (l	39.320.000,00	39.320.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.320.000,00	39.320.000,00	0,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	47.869.000,00	47.869.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.869.000,00	47.869.000,00	0,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac	3.116.000,00	616.000,00	(2.500.000,00)	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	616.000,00	616.000,00	0,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	674.041.000,00	671.416.000,00	(2.625.000,00)	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	78.622.000,00	78.622.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.622.000,00	78.622.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kao	90.205.000,00	87.580.000,00	(2.625.000,00)	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.205.000,00	87.580.000,00	(2.625.000,00)	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.125.000,00	12.125.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.125.000,00	12.125.000,00	0,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy	388.809.000,00	388.809.000,00	0,00	
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	388.809.000,00	388.809.000,00	0,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	68.760.000,00	68.760.000,00	0,00	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.760.000,00	68.760.000,00	0,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	8.270.000,00	8.270.000,00	0,00	
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.270.000,00	8.270.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	473.947.500,00	504.842.500,00	30.895.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Peri	432.890.500,00	463.785.500,00	30.895.000,00	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	306.845.500,00	337.740.500,00	30.895.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	126.045.000,00	126.045.000,00	0,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Goron	41.057.000,00	41.057.000,00	0,00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.057.000,00	41.057.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	128.792.000,00	101.982.000,00	(26.810.000,00)	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	123.935.000,00	97.125.000,00	(26.810.000,00)	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.935.000,00	97.125.000,00	(26.810.000,00)	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dip	4.857.000,00	4.857.000,00	0,00	
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.857.000,00	4.857.000,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	17.740.000,00	17.115.000,00	(625.000,00)	
2.5.01		Pengelolaan Hutan Milik Kalurahan	5.665.000,00	5.040.000,00	(625.000,00)	
2.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.665.000,00	5.040.000,00	(625.000,00)	
2.5.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	12.075.000,00	12.075.000,00	0,00	
2.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.075.000,00	12.075.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	162.372.500,00	161.922.500,00	(450.000,00)	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho DII)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	160.572.500,00	160.122.500,00	(450.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.832.500,00	61.832.500,00	0,00	
2.6.99	5.3.	Belanja Modal	98.740.000,00	98.290.000,00	(450.000,00)	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	<u>22.075.000,00</u>	<u>18.600.000,00</u>	<u>(3.475.000,00)</u>	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan	<u>11.725.000,00</u>	<u>10.250.000,00</u>	<u>(1.475.000,00)</u>	
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.725.000,00	10.250.000,00	(1.475.000,00)	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan	<u>4.500.000,00</u>	<u>3.750.000,00</u>	<u>(750.000,00)</u>	
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	750.000,00	0,00	(750.000,00)	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	<u>5.850.000,00</u>	<u>4.600.000,00</u>	<u>(1.250.000,00)</u>	
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	4.600.000,00	(1.250.000,00)	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>438.152.289,00</u>	<u>431.354.242,00</u>	<u>(6.798.047,00)</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>196.190.289,00</u>	<u>201.852.242,00</u>	<u>5.661.953,00</u>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	<u>19.125.000,00</u>	<u>25.005.000,00</u>	<u>5.880.000,00</u>	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.125.000,00	25.005.000,00	5.880.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Perorangan	<u>9.900.000,00</u>	<u>9.900.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	<u>14.030.289,00</u>	<u>14.030.289,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.030.289,00	14.030.289,00	0,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kalurahan	<u>16.375.000,00</u>	<u>16.031.953,00</u>	<u>(343.047,00)</u>	
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.375.000,00	11.031.953,00	(343.047,00)	
3.1.05	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masyarakat	<u>7.875.000,00</u>	<u>7.875.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana	<u>2.830.000,00</u>	<u>2.830.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	
3.1.94		Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	<u>126.055.000,00</u>	<u>126.180.000,00</u>	<u>125.000,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.055.000,00	113.380.000,00	(12.675.000,00)	
3.1.94	5.3.	Belanja Modal	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>121.800.000,00</u>	<u>116.650.000,00</u>	<u>(5.150.000,00)</u>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	<u>21.350.000,00</u>	<u>16.150.000,00</u>	<u>(5.200.000,00)</u>	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.350.000,00	16.150.000,00	(5.200.000,00)	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt	<u>20.400.000,00</u>	<u>20.450.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	20.450.000,00	50.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	<u>50.570.000,00</u>	<u>50.570.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.570.000,00	50.570.000,00	0,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	<u>29.480.000,00</u>	<u>29.480.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.480.000,00	29.480.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>48.155.000,00</u>	<u>44.245.000,00</u>	<u>(3.910.000,00)</u>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kalurahan	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalur	<u>10.820.000,00</u>	<u>9.460.000,00</u>	<u>(1.360.000,00)</u>	
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.820.000,00	9.460.000,00	(1.360.000,00)	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	<u>30.385.000,00</u>	<u>27.835.000,00</u>	<u>(2.550.000,00)</u>	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.385.000,00	27.835.000,00	(2.550.000,00)	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>3.950.000,00</u>	<u>3.950.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>72.007.000,00</u>	<u>68.607.000,00</u>	<u>(3.400.000,00)</u>	
3.4.02		Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	<u>15.537.000,00</u>	<u>12.537.000,00</u>	<u>(3.000.000,00)</u>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.537.000,00	12.537.000,00	(3.000.000,00)	
3.4.03		Pembinaan PKK	<u>56.470.000,00</u>	<u>56.070.000,00</u>	<u>(400.000,00)</u>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.470.000,00	56.070.000,00	(400.000,00)	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>324.445.000,00</u>	<u>324.756.250,00</u>	<u>311.250,00</u>	
4.1			<u>13.520.000,00</u>	<u>12.880.000,00</u>	<u>(640.000,00)</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.1.05		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan				
		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.1.90		Bimtek/Pelatihan/Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan	3.520.000,00	2.880.000,00	(640.000,00)	
4.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.520.000,00	2.880.000,00	(640.000,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	280.435.000,00	288.096.250,00	7.661.250,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	81.690.000,00	83.290.000,00	1.600.000,00	
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.260.000,00	6.160.000,00	(2.100.000,00)	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	73.430.000,00	77.130.000,00	3.700.000,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan	198.745.000,00	204.806.250,00	6.061.250,00	
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	198.745.000,00	204.806.250,00	6.061.250,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.095.000,00	4.480.000,00	385.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	2.615.000,00	3.000.000,00	385.000,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.615.000,00	3.000.000,00	385.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BAMUSKAL	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.120.000,00	3.400.000,00	(720.000,00)	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.120.000,00	3.400.000,00	(720.000,00)	
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.120.000,00	3.400.000,00	(720.000,00)	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	22.275.000,00	15.900.000,00	(6.375.000,00)	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	22.275.000,00	15.900.000,00	(6.375.000,00)	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.275.000,00	15.900.000,00	(6.375.000,00)	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALUR	651.231.385,00	650.826.665,00	(404.720,00)	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.472.500,00	1.472.500,00	0,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	1.472.500,00	1.472.500,00	0,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.472.500,00	1.472.500,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>1.758.885,00</u>	<u>1.354.165,00</u>	<u>(404.720,00)</u>	
5.2.00		<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	<i>1.758.885,00</i>	<i>1.354.165,00</i>	<i>(404.720,00)</i>	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.758.885,00	1.354.165,00	(404.720,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>648.000.000,00</u>	<u>648.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.01		<i>Bantuan Langsung Tunai (BLT)</i>	<i>648.000.000,00</i>	<i>648.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	648.000.000,00	648.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	6.201.357.418,00	6.074.503.754,00	(126.853.664,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(930.021.879,00)	(845.146.654,00)	84.875.225,00	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	930.021.879,00	845.146.654,00	(84.875.225,00)	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	930.021.879,00	845.146.654,00	(84.875.225,00)	
		PEMBIAYAAN NETTC	930.021.879,00	845.146.654,00	(84.875.225,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

TRIMULYO, 12 Agustus 2022

LURAH TRIMULYO

Drs. H. JAUZAN SANUSI, MA.